



LAKIP TAHUN 2023

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN
PERLINDUNGAN ANAK ,
JALAN BERINGIN NO. 3SUNGGUMINASA**



Kata Pengantar,

Assalamu Alaikum Wr. Wb. Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2023 .

Laporan ini, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Laporan Kinerja ini dibuat setiap tahun sebagai bahan evaluasi terhadap Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa .

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara maksimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk memperbaiki serta penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja di tahun – tahun yang akan datang. Semoga pada penyampaian laporan tahun berikutnya dapat lebih terarah dan dapat memenuhi harapan sesuai ketentuan .

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Assalamu Alaikum Wr. Wb ...

Sungguminasa, 5 Pebruari 2024

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten gowa,**

KAWAIDAH ALHAM.S.Sos.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19661129 198603 2 003



Ikhtisar Eksekutif,

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*), perlu adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bahan utama untuk Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun 2023, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua Instansi Pemerintah termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, wajib menyusun Laporan Kinerja dan Dokumen SAKIP, selain itu Informasi dalam dokumen Laporan Kinerja dan Dokumen Sakip merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan telah mengembangkan strategi, program dan kegiatan pada tahun 2023 dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah guna Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik. Misi yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul dan Inklusif .

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) bidang Teknis yaitu bidang *Pengarusutamaan Gender dan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak*. Kedua Bidang tersebut mempunyai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan program yang sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Adapun program – program tersebut sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program ini merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan yang Implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender yang menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan dengan terus menerus oleh para pemangku kebijakan dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik ,
2. Program Perlindungan Perempuan, program ini merupakan upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberi rasa aman dalam pemenuhan hak – haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender ,



3. Program Pemenuhan Hak Anak, program ini berperan penting dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, dimana Indikator Kabupaten Layak Anak dibuat dalam rangka mengukur kabupaten / kota menjadi layak anak, sebuah kabupaten idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak yang pengelompokannya Indikatornya kedalam enam bagian meliputi bagian penguatan kelembagaan dan lima klaster anak yaitu : Hak Sili dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya serta Perlindungan Khusus,



Daftar Isi,

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gambaran Umum Organisasi

Issu Strategis

Strategi Organisasi

BAB II RENCANA KINERJA

Tujuan dan Sasaran

Arah Kebijakan dan Strategi

Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja

Standar Penilaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Target dan Realisasi Kinerja 2023,

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Beberapa Tahun 2024

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang terdapat Pada Rencana Strategis

Realisasi Kinerja Dengan Mengacu Pada Standar Pelayanan Minimal / Standar Nasional

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Analisis Atas Efesien Penggunaan Sumberdaya.

Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

B.REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Tahun 2023



PENUTUP

BAB IV

Kesimpulan dan Saran Secara Umum

KELENGKAPAN LAMPIRAN LAPORAN KINERJA

Renstra dan Matriks Tahun 2021 - 2026

Renja dan Matriks Tahun 2023 - 2024

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2026

Perjanjian Kinerja dan Penjelasan Tahun 2024

Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Rencana Aksi Tahun 2024

Pengukuran Rencana Aksi Tahun 2023

Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2023

Pohon Kinerja dan Cascading

LHE Akip Internal

Tindak Lanjut LHE Akip Internal

Laporan Monev Rencana Aksi

Pedoman Teknis Perencanaan

Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja

Laporan Fisik Keuangan Triwulan IV

SOP Penyusunan Lkj

SK. Kepala Dinas PPPA Tentang Pembentukan TIM Internal

SK. Kepala Dinas PPPA Tentang Pemberian Penghargaan

Notulen Rapat Evaluasi dan Daftar Hadir

Dokumentasi – Dokumentasi Lainnya



Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pemerintah Daerah, salah satu prinsip mendasar yang harus dipenuhi adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas pemanfaatan sumberdaya dalam penyelenggaraan pemerintah, hal ini dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Gambaran Umum DPPPA

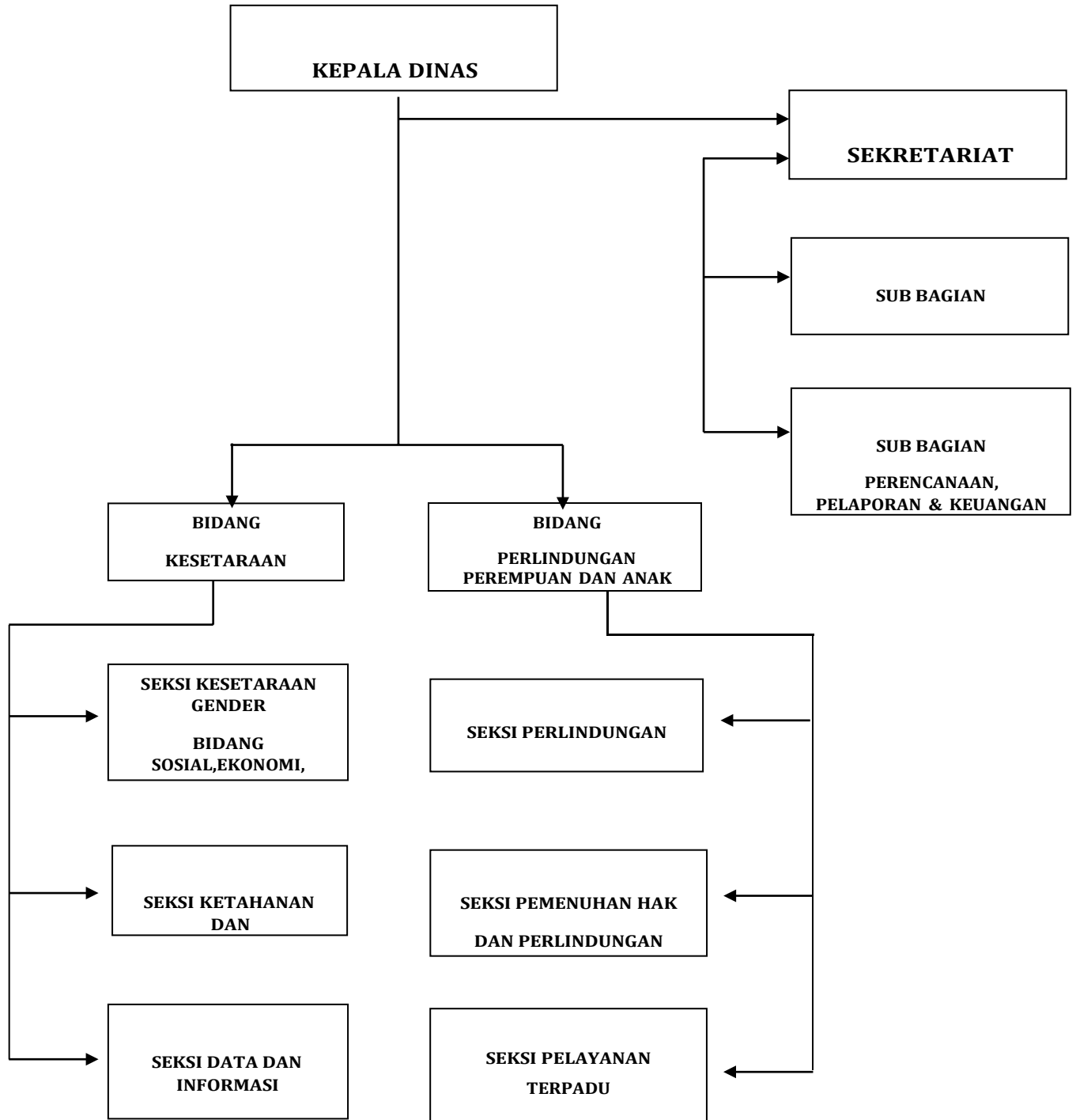
Sebagai pengembang Amanah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang mampu diraih maupun kegagalan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

Dasar penyusunan Lakip ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah disepakati.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 51 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GOWA**





Tugas Pokok,

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa melaksanakan Tugas Pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kualitas Keluarga, sistem Data Gender berdasarkan Perundang – Undangan dan Pedoman yang berlaku sesuai Lingkup Tugasnya untuk Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas ;
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati Terkait Tugas dan Fungsinya.

Tabel : 1

Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan pendidikan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Pembina Utama Muda	IV c	1 Orang
2	Pembina Tingkat I	IV b	1 Orang
3	Pembina	IV a	4 Orang
4	Penata Tingkat I	III d	4 Orang
5	Penata Muda TK. I	III b	2 Orang
6	Pengatur Muda Tingkat I	II b	1 Orang



Isu Strategis

Tabel : 2

Perumusan Isu Strategis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa.

No	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telaahan Renstra	Telaahan Visi, Misi dan Program KD dan Wakil KD Terpilih	Telaahan RTRW/KLHS	Isu-isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Pengarusutamaan gender	<ol style="list-style-type: none">1. Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum2. Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang belum terstandarisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum2. Peningkatan Kualitas hidup perempuan dan anak.	Visi: Terwujudnya masyarakat yang unggul dan tangguh dengan tata kelola pemerintahan terbaik, Misi ke 1: Meningkatkan kualitas	Pilar: Peningkatan Keberdayaan gender dan layanan kualitas hidup anak,	Belum optimalnya keberdayaan gender dan kualitas hidup anak.



LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GOWA TAHUN 2023

2	Permasalahan dalam Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, 2. Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak belum terstandarisasi		hidup masyarakat yang unggul dan inklusif		
---	---	--	--	---	--	--



Strategi Organisasi

Strategi merupakan kebijakan, program dan kegiatan, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan permasalahan yang berorientasi pada capaian tujuan organisasi. Oleh karena itu peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan ketersediaan sumberdaya dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang masing masing yang menjadi tanggungjawab sesuai tugas dan fungsi dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan tersebut.

Usaha yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan kinerja dibidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Unit Pelaksana Teknis memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian kinerja SKPD. Pada aspek Internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pengembangan potensi sumberdaya aparatur serta penyediaan sarana dan prasaranan pendukung kinerja seperti pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang.





Bab II

Perencanaan Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa adalah untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian *Visi dan Misi SKPD*, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Kesetaraan Gender, Keadilan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Lima Tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara *Kualitatif Kinerja Program (Outcome)* yang mencerminkan fungsi dan keluaran kegiatan jangka menengah dan Indikator Kegiatan (*Output)*.

Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk mengukur pencapaian Kinerja atas keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, untuk itu harus ditetapkan secara cermat dan tepat dengan memperhatikan kondisi Rill saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang dapat mempengaruhi kinerja SKPD kedepan, baik berupa pengaruh dari luar (*eksternal)* maupun pengaruh dari dalam (*Internal)* SKPD itu sendiri, oleh karena itu penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan dan peningkatan Kinerja SKPD, maka dalam menetapkan Rencana Kinerja harus mengacu pada Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja yang termuat dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran pada rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 – 2026 mengacu pada misi ke – 1 tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 .



Tabel : 1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih Tahun 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
		MISI : 1			
		Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan Inklusif			
1	Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak – hak anak baik dari akses, partisipasi, manfaat maupun kontrol dalam proses pembangunan termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, dan kelembagaan pengarusutamaan gender, serta penguatan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak.

Berdasarkan Misi, tujuan dan sasaran RPJMD diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 .

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah,

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan sebagai berikut :

Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik dengan indikator sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- partisipasi perempuan di lembaga pemerintah ;
- Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif ;
- partisipasi angkatan kerja perempuan .



LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GOWA TAHUN 2023

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Gowa
Tahun 2021-2026

Tabel : 2

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah	Persentase partisipasi perempuan dibidang pemerintah swasta dan politik	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	51.25	53.75	54.80	55.35	57.20	60.10
				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif	28.88	28.88	28.88	30.15	30.15	30.15
				Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	51.25	53.75	54.80	55.35	57.20	60.10



B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

STRATEGI

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai hingga tahun 2026, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

1. Optimalisasi implementasi regulasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sesuai SOTK dan pemanfaatan system data dan informasi;
2. Peningkatan kualitas lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak didukung oleh kejelasan SOTK dan ketersediaan sarana dan prasarana;
3. Optimalisasi peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak dan regulasi yang tersedia buntut mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan perempuan;
4. Optimalisasi pemanfaatan sistem data dan informasi untuk meningkatkan peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Peningkatan kualitas koordinasi dengan memanfaatkan sarana prasarana yg tersedia untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatnya implementasi regulasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai SOTK dan pemanfaatan system data dan informasi.
2. Pemerhati perempuan dan anak dan regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, peningkatan ketahanan keluarga
3. Meningkatnya pemanfaatan system data dan informasi untuk meningkatkan peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak :
4. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan memanfaatkan sarana prasarana yg tersedia untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ;



5. Selengkapnya ,matriks keterkaitan tujuan sasaran,strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Meningkatnya kualitas lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak didukung oleh kejelasan SOTK dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Meningkatnya peran lembaga / organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa pada table berikut:





LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GOWA TAHUN 2023

Strategi dan Arah Kebijakan Sesuai dengan Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026,
Tabel : 3

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik	<p>Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah</p> <p>Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif</p> <p>Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan</p>	<p>Optimalisasi implementasi regulasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemanfaatan sistem data dan informasi</p> <p>Peningkatan kualitas lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak didukung oleh kejelasan SOTK dan ketersediaan sarana dan prasarana</p> <p>Optimalisasi peran lembaga/ organisasi pemerhati perempuan dan anak dan regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak ,serta peningkatan ketahanan keluarga</p>	<p>Meningkatnya implementasi regulasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, sesuai SOTK dan pemanfaatan system data dan informasi</p> <p>2. Meningkatkan kualitas lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak didukung oleh kejelasan SOTK dan ketersediaan sarana dan prasarana</p> <p>3. Meningkatkan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak dan regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak , serta peningkatan ketahanan keluarga</p> <p>4. Meningkatkan pemanfaatan sistem data dan informasi untuk meningkatkan peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,</p>



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu Instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama dan menjadi hal prioritas utama. Tujuan penetapan Indikator Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Untuk memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik,
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : _____ Tahun _____ adalah sebagai berikut :

Tabel : 4

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dilembaga publik	1.Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah,	53.75	54.80	55.35	57.20	60.10
		2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif,	28.88	28.88	30.15	30.15	30.15
		3.Partisipasi angkatan kerja perempuan	53.75	54.80	55.35	57.20	60.10



D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan Integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah,
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kinerja Pegawai ,

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa,

Tabel : 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatnya partisipasi perempuan dilembaga publik	1.Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah,	Persen	Penunjang urusan pemerintahan daerah	1.754.233.015,-
	2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif,	Persen	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan,	15.000.000,-
	3.Partisipasi	Persen	Perlindungan	438.800.000,-



LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GOWA TAHUN 2023

	angkatan kerja perempuan		perempuan	
			Peningkatan kualitas keluarga	50.000.000,-
			Pemenuhan hak anak	35.000.000,-

E. STANDAR PENILAIAN KINERJ

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka ditetapkan standar pencapaian kinerja sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel : 6

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis organisasi meliputi : “ **Meningkatnya partisipasi perempuan dilembaga publik** “

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

1. Target Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja tahun anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah dipertjanjikan kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel : 1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KETERANGAN
Meningkatnya partisipasi perempuan dilembaga publik	1.Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah,	53.75	56.75	5.81	Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah tahun 2023 ditetapkan target 53.75 persen dan realisasi capaian sebesar 56.75 persen dikarenakan meningkatnya perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah.
	2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di	28.88	28.89	1.03	Proporsi kursi yang diduduki perempuan dilembaga



LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GOWA TAHUN 2023

	lembaga legislatif,				legislatif tahun 2023 ditetapkan target 28.88 persen sedangkan realisasi 28.88 persen dikarenakan belum ada penetapan pemilihan legislatif .
	3.Partisipasi angkatan kerja perempuan	53.75	58.75	9.30	Partisipasi angkatan kerja perempuan dilembaga pemerintah tahun 2023 ditetapkan target 53.75 persen dan realisasi mencapai 58.75 persen dikarenakan meningkatnya pencari kerja perempuan dilembaga pemerintah dan non pemerintah.





Adapun capaian kinerja diatas sasaran strategisnya dari setiap Indikator mempunyai rata rata keberhasilan sebesar 49.95 % pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 45 %. Ini disebabkan partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan tiga Indikator yaitu proporsi kontribusi perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan diparlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai manajerial tenaga, profesional, administrasi dan personal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk melihat sejauh mana keinginan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2023

Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :

Tabel : 2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 dan 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya partisipasi perempuan dilembaga publik	1.Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah,	51.25	55.03	56.75				4.77	5.81			
	2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif,	28.88	28.89	28.89				1.03	1.03			
	3.Partisipasi angkatan kerja perempuan	52.10	54.20	58.75				4.96	9.30			



Pengukuran kinerja dari tahun 2022 – 2026 untuk menunjukkan peningkatan / penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel diatas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis yaitu meningkatnya partisipasi perempuan dilembaga publik, Indikator dari sasaran tersebut yaitu partisipasi perempuan dilembaga pemerintah, proporsi kursi yang diduduki perempuan dilembaga legislatif serta partisipasi angkatan kerja perempuan, Realisasi kinerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan dimana partisipasi perempuan dilembaga pemerintah maupun angkatan kerja perempuan menunjukkan peningkatan dengan adanya kesetaraan gender baik itu dalam pengambilan keputusan dalam manejerial maupun keterlibatan perempuan dalam perekonomian dan politik .

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis,

Analisis berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2026 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .

Pengukuran realisasi kinerja mengacu tabulasi target jangka menengah sebagaimana dalam rencana strategis tahun 2021 – 2026 sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel : 3

Realisasi Kinerja yang mengacu padaTarget Jangka Menengah Rensta

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja					
			2026	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya partisipasi perempuan dilembaga publik	1.Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah,	60.10	55.03	56.75				
		2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif,	30.15	28.89	28.89				
		3.Partisipasi angkatan kerja perempuan	60.10	54.20	58.75				



Terjadinya peningkatan pada realisasi kinerja diatas disebabkan karena partisipasi angkatan kerja perempuan berbanding dengan angkatan kerja laki laki serta partisipasi perempuan dapat memainkan peran yang aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik serta dalam pengambilan keputusan baik dalam lembaga pemerintah maupun lembaganon pemerintah.

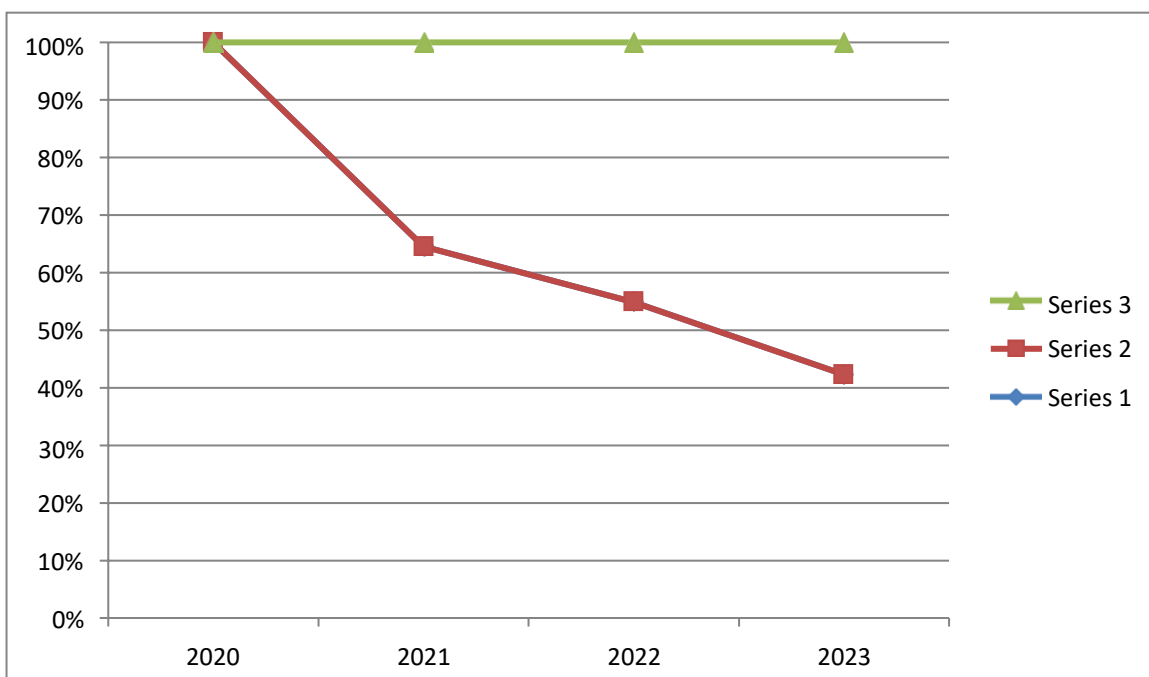
4. Realisasi Kinerja dengan Mengacu pada Standar Pelayanan Minimal SPM / Standar Nasional Lainnya

Tabel : 4

Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasionallainnya

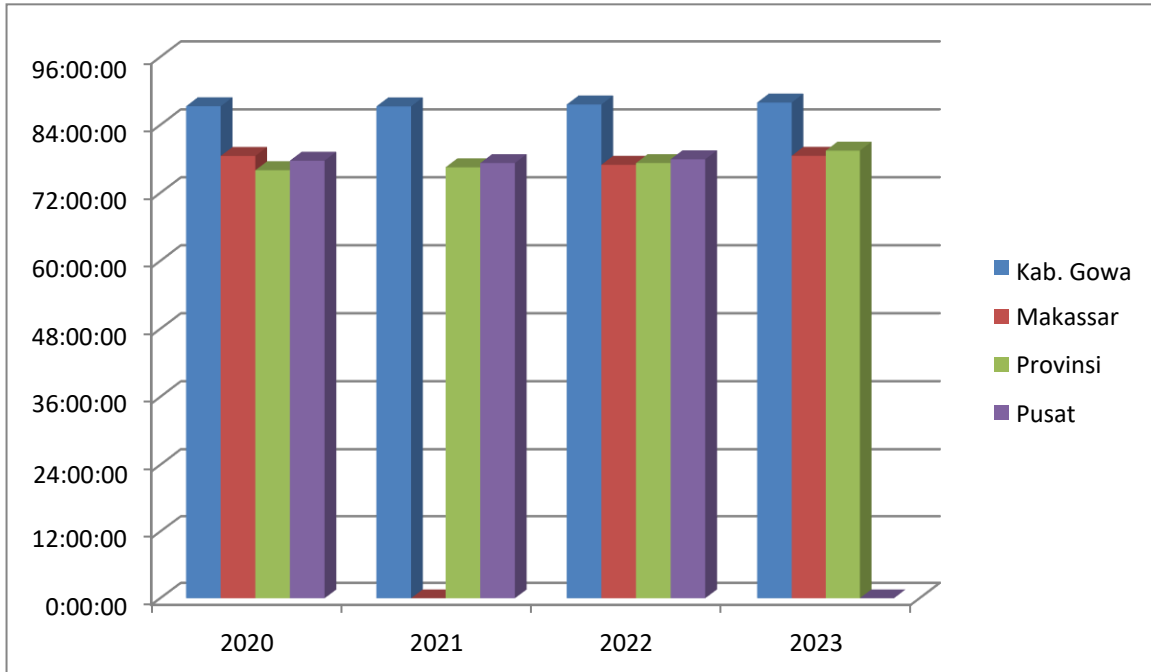
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	
			Kinerja	Target	Realisasi
			2022	2023	2023
1	2	2	4	5	6
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	87.58	79.57	88.98

Grafik Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Gowa Tahun 2019 - 2022





Grafik Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Gowa dengan makassar, provinsi dan pusat .



Tabel : 5

Angka Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Gowa, Makassar, Provinsi dan Pusat

Wilayah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Gowa	87.17	87.37	87.58	87.80
Makassar	87.32	77.61	76.59	78.34
Provinsi	76.01	76.32	74.76	79.28
Pusat	77.42	77.17	77.57	79.72

Keberhasilan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender disebabkan oleh peningkatan peranan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan sosio-ekonomi memiliki pengaruh satu sama lain dengan jumlah anak dalam keluarga semakin tinggi status perempuan, semakin sedikit jumlah anak semakin besar kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan status sosio ekonomi mereka. Pelatihan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya diharapkan dapat terselenggara secara berkelanjutan



Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dimana perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektif penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

1. **“Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Lembaga Publik “** dengan capaian kinerja 100 % dan capaian anggaran 96.29 %.

7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

**Tabel : 7
Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Lembaga Publik	Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	5.81	1. Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	95.14	95.14	
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif	1.03	2. Pengarusutamaan gender,	Persentase ARG pada belanja APBD	100	100	100	
	Partisipasi angkatan kerja perempuan		3. Perlindungan perempuan	Persentase Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terstandarisasi	100	100	100	
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	9.30	4. Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Ketahanan Keluarga Yang Aktif	100	100	100	
			4. Pemenuhan hak anak	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	100	100	100	



1. Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah **“Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Lembaga Publik “** dengan Indikator sebagai berikut :

Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah,
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif,
Partisipasi angkatan kerja perempuan .

2. Upaya Perbaikan pada Perencanaan berikutnya ,
Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 melalui 4 (empat) program dan 10 (sepuluh) kegiatan, ada upaya upaya yang harus dilakukan agar lebih meningkatkan kinerja ditahun mendatang khususnya menyangkut kegiatan kegiatan yang mendukung sasaran yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

B. REALISASI ANGGARAN,

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 96.29 % dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GOWA TAHUN 2023

Tabel : 8

**Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2022**

No.	Uraian Sasaran, Program, Kegiatan	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
	Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Lembaga Publik			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.751.233.394	1.666.177.076	95,14
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.130.000	11.130.000	100
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.476.648.246	1.393.991.928	94.40
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	14.911.200	12.511.200	89.90
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	67.751.100	67.751.100	100
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	108.572.848	108.572.848	100
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	72.220.000	72.220.000	100
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000	15.000.000	100
	<i>Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten kota</i>	15.000.000	15.000.000	100
	Program Perlindungan Perempuan	438.800.000	438.800.000	100
	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	241.759.200	241.759.200	100
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	122.400.000	122.400.000	100
	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	74.640.800	74.640.800	100
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	50.000.000	50.000.000	100



LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GOWA TAHUN 2022

	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	50.000.000	50.000.000	100
	Program Pemenuhan Hak Anak	63.000.000	63.000.000	100
	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota</i>	31.500.000	31.500.000	100
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota</i>	31.500.000	31.500.000	100
	TOTAL	2.290.033.394	2.204.977.076	96,29



Bab IV PENUTUP

KESIMPULAN KINERJA ,

Pelaksanaan tugas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa. Untuk itu perlunya kerjasama dengan Instansi terkait , LSM, Organisasi Masyarakat Organisasi Perempuan maupun Media serta dunia usaha.

Disamping itu juga *Capacity Building* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa perlu ditingkatkan dalam mendukung kinerja profesionalisme serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dalam setiap melihat permasalahan yang timbul dapat ditangani secara holistik, wajar dan benar serta meningkatkan kerjasama antar staf dan pimpinan sehingga terjalin hubungan kerja yang harmonis , secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa telah berjalan sesuai dengan yang rencana.

LANGKAH ADMINISTRATIF DAN STRATEGI PEMECAHANNYA .

1. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dalam rangka Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
2. Meningkatkan Pemahaman dan Komitmen Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa, tentang Pemenuhan Hak Anak diantaranya Pemenuhan Hak Anak dengan berfokus pada Percepatan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA) .
3. Meningkatkan Pemahaman Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Masyarakat dan Dunia Usaha tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak termasuk TPPO.
4. Peningkatan Kualitas Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk SDM yang Melayani Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2023 Kami Sampaikan, Semoga Dapat Bermanfaat .



LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GOWA TAHUN 2023





LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GOWA TAHUN 2023

